

Multikulturalisme: Tantangan Transformasi Pendidikan Nasional¹

CHOIRUL FUAD YUSUF

Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

One of the futur's challenges of the Indonesian nation—as the plural and multicultural nation—is the problem of how to maintain the Negara Kesatuan Republik Indonesia (Unitary State of the Republic of Indonesia) to be more integrated, unified, and harmonious in the future. For this purpose, one of the best strategies for developing and maintaining the Negara Kesatuan Republik Indonesia is to develop the multiculturalism-oriented education. This article intends to explicate the importance of multicultural education in the dynamics of the global development and in Indonesia as the multicultural nation, and how to realize it in order to empower and maintain the NKRI. .

Pengantar

Kehidupan dalam milenium ketiga berbeda jauh dari masa sebelumnya. Di era ini, tiada lagi orang atau masyarakat merasa terasing dari belahan dunia dan masyarakat

lainnya. Revolusi teknologi informasi dan transportasi menyebabkan seakan individu atau masyarakat hidup dalam “*single village*” tanpa batas teritori atau kulturalnya, sehingga kesadaran manusia mileni-

¹ Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional **Globalisasi dan Liberalisasi Pendidikan**, di Kampus Universitas Juanda, Bogor, 2006.

um ini mampu menembus kehidupan tanpa batas waktu dan geografik.

Namun demikian, perubahan yang terjadi begitu cepat, melalui proses globalisasi, selain berakibat lahirnya "globalisme" dan "*global culture*", juga secara bersamaan melahirkan pula rasa keterasingan dan kegelisahan dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, di tengah derap perubahan demikian cepat, individu atau masyarakat dituntut secara tepat mengambil sikap bagaimana seharusnya menyikapi kehidupan di masa depan dengan segenap resikonya. Lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, dsb., di tengah kehidupan yang *belepotan* dengan aneka paradoks sosial, ekonomi, budaya, dan politik, niscaya dituntut menentukan sikap bagaimana seharusnya menghadapi situasi perubahan yang tengah terjadi.

Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia dan negara bangsa, tak pelak mengalami perubahan sangat mendasar dalam berbagai aspeknya. Proses globalisasi dan kehadiran gerakan reformasi, pada tataran sosio-kultural, menuntut berbagai upaya perubahan penyempurnaan dalam meraih cita-citanya sebagai negara yang maju, berwibawa, dan manusiawi. Salah satu

upaya menata masa depan yang penuh resiko adalah membangun masyarakat madani. Sebuah masyarakat demokratis yang menghormati HAM, menghargai nilai-nilai humanisme universal, menghormati keragaman dan perbedaan, di samping tentu saja menghargai nilai-nilai lokal (*locality*) positif dan *socially acceptable*. Hal ini, lantaran perbedaan atau keragaman secara alami dapat menjadi potensi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama, namun sebaliknya bisa pula menjadi faktor penyebab kehancuran umat. Persoalannya terletak pada bagaimana strategi pengelolaannya.

Multikulturalisme : Keniscayaan Global

Proses globalisasi, yang lahir bersamaan dengan modernisasi di Barat, tak dapat dipungkiri membawa dampak positif bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Globalisasi melahirkan lembaga sistemik dari semua relasi sosial. Globalisasi, yang didukung teknologi komunikasi canggih, menghilangkan sekat-sekat pembatasan atau pemisahan ruang dan waktu, juga ras, etnik, bahasa, budaya, dan keyakinan. Globalisasi, dalam prosesnya membentuk "*global*

village”, “*global culture*”, dan globalisme yang positif dan konstruktif bagi kepentingan hidup umat manusia di bumi. Namun demikian, secara berbarengan, globalisasi juga membawa dampak samping negatif (*negative side-effects*) yang serius dan destruktif bagi tatanan kehidupan lokal (masyarakat suatu teritori) yang telah lama hidup berdasar nilai dan norma yang dipersepsi selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Globalisme dan budaya global bersama sistem nilai dan norma produk pemikiran filosofis humanistik, materialistik, pragmatis, dan liberal yang mengiringinya di satu pihak menumbuhkan humanisme dan humanitas positif, tetapi di pihak lain menghancurkan atau merusak sistem nilai dan norma yang sudah lama dianut dan dipedomani masyarakat. Runtuhnya nilai-nilai tradisional seperti rusaknya orientasi hidup berdasar nilai-nilai tradisional, hubungan sosial berdasar cinta-kasih, kontrol sosial berdasar adat-istiadat dan agama, dan sebagainya merupakan contoh konkret dampak negatif globalisasi yang terus bergulir dan merambah kehidupan dewasa ini. Sebagai akibat lanjutan, perang peradaban antara peradaban global dan lokal ini, tak

pelak tumbuh berkembang tak terelakkan.

Masyarakat Indonesia, sebagai bangsa berlatar multiras, multietnik, multibudaya, dan multiagama dan multiinteres, dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, yang menghuni ribuan pulau nusantara, tak dapat dapat dihindarkan, terimbasi pula dinamika peradaban global yang merambah dalam berbagai dimensinya. Perubahan-perubahan sosio-kultural yang terjadi, diperkuat oleh hadirnya gerakan reformasi, sejak 1997, selain berdampak positif bagi perkembangan struktur kehidupan masyarakat Indonesia, juga menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang perlu pemecahan, seperti : terjadinya disorganisasi sosial, tumbuhnya suasana kehidupan yang disharmoni, anarkis, dan anomik, serta berbagai bentuk konflik sosial, kriminalitas dan penyimpangan sosial lainnya.

Berdasarkan realitas global dan lokal dengan segenap tuntutanannya tersebut, secara sosio-politik, maupun sosio-kultural, pengembangan wawasan multikulturalisme, dalam berbagai aspeknya, tampak menjadi suatu kebutuhan bangsa yang masih memerlukan kesatuan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Me-

lalui, pengembangan wawasan multikulturalisme, diharapkan pada tataran politik, bangsa Indonesia, tetap diakui dan dihormati sebagai masyarakat global yang peduli dan “involved” dalam pemecahan persoalan bersama masyarakat ke-sejagatan.² Dalam konteks inilah, apa pun bentuk upaya ke arah pengembangan multikulturalisme menjadi signifikan bagi penataan tatanan kehidupan penuh damai pada spektrum global maupun lokal. Dan, salah satunya pendekatan terefektif adalah melalui pengembangan pendidikan multikultural. Karena, bagaimana pun, pendidikan sebagai proses humanisasi, proses transfer dan transmisi nilai dan norma, proses sosialisasi, proses sivilisasi (pengadaban), dan proses pembudayaan menjadi sangat strategis bagi upaya penyadaran kolektif dalam rangka penciptaan masyarakat ideal di masa datang.

Seperti Apa Pendidikan Multikultural Indonesia ?

Multikulturalisme (*multiculturalism*), secara filosofik, pada dasarnya merupakan pandangan yang meyakini bahwa dalam realitas kehidupan terdapat keragaman (*diversity*) atau kemajemukan (*plurality*) kebangsaan, ras, suku, bahasa, tradisi, agama, kepentingan, dan sebagainya yang harus dihormati, diakui, atau difungsikan. Oleh karena itu, banyak ilmuwan sosial mengistilahkan multikulturalisme dengan “*cultural pluralism*”. Berdasarkan asumsi ini, multikulturalisme menghendaki terbangunnya tatanan kehidupan (*life-order*) yang seimbang, harmoni, fungsional, dan sistemik. Multikulturalisme tidak menghendaki terjadinya proses diskriminasi atau pembedaan status, *positioning differentiation* dan pemungisian substruktur atau subkultur

² Terdapat sejumlah besar isu global yang harus ditangani bersama masyarakat dunia karena berakibat pada tingkat keamanan dan kesejahteraan umat se-dunia, diantaranya adalah : pengatasan kemiskinan (*economic and social threats*), konflik antar dan intranegara, terorisme, dan kejahatan transnasional. Lihat : *United Nations, A More Secure World : Our Shared responsibility, Report of the Secretary-General's High Level Panel on Threats, Challenges, and Change, 2004, p.2-3.* Bahkan *National Intelligence Council* memprediksi bahwa ancaman dan tantangan global di atas, masih beresiko tinggi dan menjadi agenda global utama bersama hingga tahun 2020 yang harus diseriisi bersama (*Mapping the Global Future : Report of the National Intelligence Council's 2002, University Press of The Pacific Honolulu, Hawaii, 2005, p. 25*).

tertentu oleh kelompok (substruktur) dominan atau superior. Target ideologi multikulturalisme adalah memperjuangkan “*collective rights*” komunitas minoritas³ dan membangun suasana terjadinya proses emansipasi melalui politik perbedaan.⁴ Dengan demikian, multikulturalisme pada tahapan awal, paling tidak, menyitakan terpeliharanya keragaman budaya (*cultural variety*) dari gilasan proses universalisasi budaya. Kemudian, pada tahapan berikutnya, gerakan multikulturalis berharap mampu membangun hibriditas budaya dari dua atau lebih budaya bangsa yang berbeda.⁵ Dalam konteks sosial-budaya, David Aronson dalam *Teaching Tolerance* (1994)⁶ menggarisbawahi bahwa hal terpenting dan paling sentral dari gagasan multikult-

uralisme adalah membangun toleransi terhadap perbedaan, atau menghargai kebebasan satu sama lain dalam rangka membangun suasana dan visi kehidupan bersama yang wajar dan lebih baik sehingga terjadi “*personal and social growth*” dan kesejahteraan bersama secara alami, manusiawi dan proporsional sesuai dengan tantangan yang dihadapinya,⁷ Visi Indonesia 2020, bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, bermoral, berperikemanusiaan, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju dan mandiri, serta pelaksanaan *good government*.

Oleh karena itu, pendidikan multikultural Indonesia, pada tataran politis, diarahkan pada pengembangan dan penguatan NKRI sebagai *nation-state*. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan masya-

³ Will Kymlicka, “Multicultural Citizenship”, dalam Steven Seidmen and Jeffery C. Alexander (Ed.), *The New Social Theory Reader*, Rotledge, London, 2001, p.217.

⁴ Iris Marion Young, “Justice and the Politics of Difference”, dalam Steven Seidmen and Jeffery C. Alexander, *ibid* 206.

⁵ Henry L.Gates, “Beyond the Culture Wars : Identities in Dialogue” , dalam *Multiculturalism : The Task of Literary Representation in the Twenty-First Century*, Phyllis Franklin, Modern Language Association, 1993. .

⁶ David Aronson, “*Multiculturalism and Diversity*”, dalam *National Forum*, No.74, p.28-31.

⁷ Simak TAP MPR No.V/MPRI/2000 tentang *Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional*, bahwa tantangan yang akan dihadapi bangsa/negara Indonesia, menjelang tahun 2020, diantaranya adalah perlunya : (1) Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara, (2) sistem hukum yang adil,; (3) sistem politik yang demokratis, (4) sistem ekonomi yang adil dan produktif, (5) sistem sosial budaya yang beradab, (6) peningkatan sumberdaya manusia bermutu, dan (7) ketahanan eksistensi dan integritasnya sebagai bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

rakat Indonesia—yang tengah ber-
euforia reformasi dan otonomi
daerah dengan segenap implikasi-
nya—dapat digugah dan dibangun
kembali kesadarannya untuk mem-
perkuat dan mengembangkan *sense
of nationalism* sehingga NKRI tetap
eksis, lestari dan kuat disamping
mempercepat terwujudnya masya-
rakat madani (*civil society*). Pada
tataran kultural, pendidikan multi-
kultural, diorientasikan pada pe-
ngembangan kesadaran pengakuan,
penerimaan dan penghargaan ter-
hadap pluralitas dan multikul-
turalitas nilai dan norma dalam
masyarakat. Melalui pendidikan
multikultural diharapkan, budaya
global dan budaya lokal akan ber-
jalan, tumbuh dan berkembang
secara koeksisten, kolaboratif,
simbiotik, dan saling mengisi ke-
kurangan sehingga mampu meme-
lihara keseimbangan tatanan ke-
hidupan. Lebih jauh, pada tataran ini,
secara berbarengan, pendidikan
multikultural diharapkan pula dapat
mengembangkan relativisme budaya
dan mengeliminasi etnosentrisme
sekaligus. Pada tataran relijius atau
sosio-doktrinal, pendidikan multi-
kultural diharapkan dapat mengem-
bangkan nilai-nilai inklusivisme ke-
agamaan (*religious inclusivism*) yang
mengedepankan nilai-nilai toleransi,

kesamaan orientasi hidup, dan sikap
saling menghormati sekaligus meng-
eliminasi eksklusivisme keagamaan
(*religious exclusivism*) yang cenderung
melahirkan gerakan radikal ke-
agamaan yang ekstrim yang tengah
marak di tengah kehidupan kita.
Pada tataran doktrinal ini, tingkat
keberhasilan pendidikan multi-
kultural akan menentukan tingkat
intensitas konflik sosial berbasis
agama.

Program Prioritas Pendidikan Multikultural

• Program prioritas pendidikan
multikultural Indonesia, secara
substansif, haruslah disesuaikan
dengan filosofi, historisitas kultu-
ral, dan visi masa depan Indo-
nesia. Paling tidak, beberapa
prinsip yang perlu dijadikan
acuan atau kriteria dalam penye-
lenggaraan program pendidikan
multikultural Indonesia. *Pertama*,
pendidikan multikultural harus
didasarkan pada pendidikan
kesetaraan manusia (*equity pe-
dagogy*) dalam upaya memosisi-
kan, memungsikan, dan meng-
hargai martabat manusia (*human
dignity*) secara proporsional. *Kedua*,
pendidikan multikultural
harus diorientasikan pada pe-

ngembangan kecerdasan dan kebebasan dalam rangka membangun *civilized society*. *Ketiga*, pendidikan multikultural harus diorientasikan pada penguatan NKRI, dan kerukunan hidup umat beragama dalam rangka *nation & world-society building*. *Keempat*, pendidikan multikultural harus diorientasikan pada upaya penyeimbangan tatanan kehidupan sosial dari pengaruh destruktif globalisasi dan lokalisasi, dalam upaya membangun *glocal village*, dimana terjadi keseimbangan antara unsur budaya global dan lokal.

- Dalam upaya pencapaian keberhasilan pendidikan multikultural ini, keterlibatan semua pihak (pemerintah, orpol, ormas, organisasi keagamaan, masyarakat luas, dan institusi lainnya) niscaya diperlukan partisipasi aktif dan kesungguhannya jikalau menghendaki kehidupan dalam *baladatul thoyyibatun wa rabbun ghofur*.□